
SEMANGAT KEBANGSAAN KAUM RELIGIUS KATOLIK SEBAGAI UPAYA KONTRA-RADIKALISME AGAMA DI MASYARAKAT PLURAL KOTA PONTIANAK

**Maria Magdalena Husun^{1*}, Yanto Sandy Tjang², Amandus Suhaedi Dol³,
Felisitas Yuswanto⁴**

^{1,2,3,4} Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

**Email: mariamagdalenuhusun15@gmail.com*

Abstrak

Radikalisme agama merupakan fenomena multidimensional yang muncul dari interaksi kompleks antara faktor teologis, sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan. Dalam masyarakat plural seperti Kota Pontianak, radikalisme berpotensi mengganggu kohesi sosial jika tidak ditangani melalui pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan iman, etika, dan praktik sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana biarawan dan biarawati Katolik menginternalisasi dan mengaktualisasikan semangat kebangsaan sebagai strategi kontra-radikalisme, sekaligus memahami makna ajaran Gereja dalam konteks keberagaman, demokrasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh religius di beberapa paroki Keuskupan Agung Pontianak dan dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan radikalisme dilaksanakan melalui pendidikan agama Katolik yang mencerahkan, dialog lintas iman, penguatan nilai toleransi, penghormatan terhadap martabat manusia, pengembangan pola pikir kritis, serta keterlibatan aktif dalam komunitas keberagaman. Implementasi semangat kebangsaan ini tidak hanya memperkuat loyalitas terhadap negara, tetapi juga menegaskan panggilan Injili untuk hidup dalam persaudaraan, solidaritas, dan keadilan. Dengan demikian, biarawan-biarawati berperan sebagai agen transformasi sosial yang membumikan nilai Injili sekaligus memperkuat kohesi dan perdamaian dalam masyarakat plural.

Kata kunci: *Biarawan-biarawati Katolik; Moderasi beragama; Pluralitas sosial; Radikalisme agama; Semangat kebangsaan.*

Abstract

Religious radicalism is a multidimensional phenomenon arising from the complex interaction of theological, social, political, economic, and educational factors. In pluralistic societies such as Pontianak, radicalism has the potential to disrupt social cohesion if not addressed through a comprehensive approach that integrates faith, ethics, and social practice. This study aims to analyze how Catholic monks and nuns internalize and actualize the spirit of nationalism as a counter-radicalism strategy, while also understanding the meaning of Church teachings in the context of diversity, democracy, and respect for human dignity.

Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with religious figures across several parishes of the Archdiocese of Pontianak and analyzed thematically. The findings indicate that radicalism prevention is carried out through enlightening Catholic religious education, interfaith dialogue, the reinforcement of tolerance values, respect for human dignity, development of critical thinking, and active engagement in diverse communities. The implementation of the spirit of nationalism not only strengthens loyalty to the state but also affirms the Gospel's call to live in fraternity, solidarity, and justice. Accordingly, monks and nuns serve as agents of social transformation, embodying Gospel values while enhancing cohesion and peace in pluralistic societies.

Keywords: *Catholic monks and nuns; Religious moderation; Religious radicalism; Social plurality; Spirit of nationalism*

PENDAHULUAN

Radikalisme keagamaan merupakan fenomena kompleks yang menjadi tantangan utama dalam kehidupan masyarakat yang plural seperti Indonesia. Keberagaman etnis, agama, dan budaya merupakan kondisi sosial yang inheren dan memerlukan pengelolaan berbasis dialog, saling menghormati, dan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal (Kubacki, 2021). Realitas pluralitas ini berpotensi mengalami distorsi menjadi eksklusivisme identitas dan polarisasi sosial jika tidak didukung oleh kerangka etis dan dialogis yang kuat, sehingga memunculkan beragam bentuk konflik sosial. Konsep radikalisme sendiri kerap didefinisikan sebagai sikap religius yang absolutistik dan tertutup terhadap legitimasi pihak lain, yang dalam praktik sosial sering diwujudkan melalui klaim kebenaran tunggal disertai delegitimasi terhadap kelompok berbeda (Wahyuni et al., 2022).

Dalam kajian teologis dan historis, kekristenan pun menunjukkan bahwa agama tidak kebal dari dinamika radikalisme. Misalnya, konflik seperti Perang Salib pada Abad Pertengahan memperlihatkan bagaimana sentimen religius dapat tumpang tindih dengan kepentingan politik dan kekuasaan, sehingga menegaskan pentingnya refleksi kritis terhadap distorsi ajaran agama yang terlepas dari prinsip kasih dan penghormatan terhadap martabat manusia. Refleksi semacam ini menunjukkan bahwa tradisi Kristen perlu terus menegaskan sikap teologis yang menolak kekerasan sebagai ekspresi iman (Steffen, 2021). Dalam tradisi ajaran sosial Gereja Katolik kontemporer, penolakan terhadap segala bentuk kekerasan ditegaskan secara konsisten sebagai bagian dari panggilan untuk hidup dalam persaudaraan dan solidaritas universal. Ensklik Fratelli Tutti menegaskan bahwa tindakan kekerasan dan kebencian yang dilakukan atas nama agama tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan martabat manusia dan panggilan untuk persaudaraan. Dokumen ini menggarisbawahi pentingnya dialog antar

agama sebagai bentuk konkret untuk membangun kepercayaan, kerja sama sosial, dan kesejahteraan bersama, menjadikannya lebih dari sekadar forum formal tetapi dialog eksistensial yang menghormati kemanusiaan universal (Francis, 2020).

Dalam konteks Indonesia, semangat persaudaraan dan dialog lintas iman ini sejalan dengan nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila, yang menegaskan prinsip persatuan dalam keberagaman (Anggoro & Albina, 2025). Kontribusi kaum religius, khususnya biarawan dan biarawati Katolik, menjadi signifikan melalui praktik spiritualitas yang terwujud dalam pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan karya amal yang membumikan nilai injili. Kehadiran mereka dalam kehidupan sosial plural memperkuat relasi lintas agama dan menjadi instrumen efektif untuk mencegah berkembangnya radikalisme berbasis identitas melalui transformasi kesadaran sosial dan komitmen terhadap martabat manusia (Gurusinga et al., 2025).

Kota Pontianak, sebagai miniatur kehidupan plural di Indonesia dengan keberagaman etnis dan agama yang relatif seimbang, menawarkan konteks empiris penting untuk menelaah bagaimana internalisasi semangat kebangsaan dan nilai Gereja dilaksanakan dalam praksis hidup religius. Interaksi sosial yang intens di ruang publik menjadikan pendekatan lintas agama dan dialog antar komunitas sebagai elemen krusial dalam menjaga kohesi sosial dan merespons dinamika radikalisme (Wahyuni et al., 2025). Meskipun sudah ada sejumlah penelitian mengenai radikalisme dan peran agama dalam menjaga keutuhan bangsa, kajian yang secara khusus menelusuri internalisasi semangat kebangsaan oleh kaum religius Katolik dalam konteks lokal seperti Pontianak masih relatif terbatas (Wahyuni et al., 2025; Martinus et al., 2023). Hal ini memberikan ruang untuk pendekatan integratif yang memadukan refleksi teologis dengan pengalaman konkret dalam praksis hidup religius.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kaum religius Katolik di Pontianak menginternalisasi dan mengaktualisasikan semangat kebangsaan sebagai strategi kontra-radikalisme, serta memahami bagaimana mereka memaknai ajaran Gereja dalam relasinya dengan kebhinekaan, demokrasi, dan nasionalisme yang berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan orientasi pada pendalaman makna, pengalaman, dan konteks sosial-keagamaan para partisipan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami realitas secara

naturalistik tanpa manipulasi variabel, sehingga dinamika refleksi iman dan praksis religius dapat dipahami secara utuh (Creswell & Poth, 2018). Penelitian dilakukan di Kota Pontianak Kalimantan Barat, pada 08 Juli hingga 02 Agustus 2022. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah tokoh awam, rohaniwan/Pastor/Romo (Biarawan-Biarawati) yang terdapat di beberapa Paroki di bawah Keuskupan Agung Pontianak. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur yang memberi ruang eksplorasi reflektif atas pengalaman dan pandangan informan, sekaligus menjaga fokus melalui pedoman pertanyaan terbuka. Analisis data mengikuti model interaktif reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikembangkan dalam pendekatan analisis kualitatif kontemporer. Proses pengkodean dilakukan secara tematik dan reflektif untuk menemukan pola makna. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan *member checking* terbatas guna memastikan kredibilitas serta konsistensi interpretasi. Melalui proses tersebut, temuan empiris dikonstruksi secara sistematis dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akar Penyebab Munculnya Radikalisme

Radikalisme agama tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan bertumbuh melalui pertautan kompleks antara faktor ideologis, sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan. Pada aras konseptual, radikalisme berakar pada cara pandang keagamaan yang eksklusif dan absolutistik terhadap kebenaran, yang kemudian berkembang menjadi sikap penolakan terhadap nilai dan sistem sosial-politik yang disepakati bersama. Ketika perbedaan penafsiran ajaran agama tidak dikelola dalam ruang dialog yang sehat, perbedaan tersebut dapat berubah menjadi konfrontasi yang membenarkan tindakan intoleran bahkan kekerasan atas nama iman (Medda-Windischer et al., 2024). Dalam refleksi sosial Gereja, kecenderungan tersebut dipandang sebagai distorsi religius yang bertentangan dengan martabat manusia dan panggilan persaudaraan universal (Francis, 2020).

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan yang sempit dan literalistik menjadi salah satu faktor signifikan dalam mendorong radikalisme. Penafsiran teks suci yang dilepaskan dari konteks historis dan sosial berpotensi melahirkan klaim kebenaran tunggal yang menutup ruang dialog. Keragaman interpretasi sejatinya merupakan keniscayaan dalam tradisi keagamaan, namun ketika satu tafsir dimutlakkan dan menegasikan tafsir lain, agama mudah direduksi menjadi legitimasi ideologis (Tjang & Soeryamassoka, 2025). Di samping faktor teologis, persepsi

ketidakadilan politik dan ketimpangan ekonomi juga berperan penting. Rasa frustrasi kolektif akibat marginalisasi atau kekecewaan terhadap elite politik dapat memicu pencarian identitas alternatif yang lebih tegas dan konfrontatif. Dalam situasi demikian, simbol-simbol agama kerap dimobilisasi sebagai medium perjuangan untuk “meluruskan” keadaan yang dianggap menyimpang. Lemahnya penegakan hukum dan ketidakadilan yuridis semakin memperkuat rasa ketidakpercayaan terhadap institusi negara, sehingga radikalisme tampil sebagai bentuk resistensi simbolik terhadap struktur yang dipersepsikan tidak adil (Franc & Pavlović, 2023).

Faktor pendidikan juga memiliki kontribusi signifikan. Model pendidikan yang indoktrinatif dan kurang memberi ruang bagi refleksi kritis berpotensi membentuk pola pikir kaku dan tidak toleran. Pendidikan agama yang hanya menekankan aspek ritual-formal tanpa mengembangkan dimensi etis, dialogis, dan humanis dapat mempermudah munculnya sikap eksklusif. Sebaliknya, pendekatan pendidikan yang transformatif yang membina nalar kritis, empati sosial, dan penghargaan terhadap keberagaman menjadi sarana preventif terhadap radikalisme (Banks, 2016). Dalam konteks kontemporer, penyebaran ideologi radikal juga difasilitasi oleh ruang publik digital yang memungkinkan diseminasi gagasan secara cepat dan luas, sehingga radikalisme tidak lagi terbatas pada komunitas tertutup, melainkan menjadi fenomena multidimensional yang bersentuhan dengan budaya komunikasi global (Jarvis et al., 2017).

Oleh karena itu, pencegahan radikalisme menuntut strategi komprehensif yang melibatkan penguatan literasi keagamaan, pendidikan kritis, penegakan hukum yang adil, serta pemberdayaan sosial-ekonomi. Pendalaman ajaran agama melalui pembacaan reflektif terhadap Kitab Suci, dialog lintas iman, dan keterlibatan dalam komunitas yang inklusif dapat membentuk karakter religius yang matang dan terbuka. Relasi personal dengan Allah yang terwujud dalam sikap kasih, penghormatan terhadap perbedaan, dan komitmen pada kesejahteraan bersama menjadi fondasi spiritual yang mencegah instrumentalitas agama sebagai alat kekerasan. Dengan demikian, radikalisme tidak dapat direduksi sebagai persoalan teologis semata, melainkan harus dipahami sebagai hasil interaksi kompleks antara pemahaman iman, dinamika sosial-politik, sistem hukum, dan pola pendidikan, yang penanganannya memerlukan kerja kolaboratif seluruh elemen masyarakat (Francis, 2020; Pontifical Council for Justice and Peace, 2004).

Radikalisme Agama dalam Konteks Ajaran Katolik

Radikalisme agama dipahami sebagai bentuk keberagamaan yang eksklusif dan absolutistik, yang menutup ruang dialog serta menegasikan legitimasi pihak lain. Sikap tersebut biasanya disertai klaim kebenaran tunggal yang menolak keberadaan tradisi keagamaan lain (Cornille, 2013), bahkan dalam konteks tertentu dapat berkembang menjadi penolakan terhadap konsensus kebangsaan seperti Pancasila dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dalam terang teologi Katolik, orientasi semacam ini bertentangan dengan hakikat iman Kristiani yang berakar pada kasih serta pengakuan akan martabat setiap manusia sebagai citra Allah. Melalui deklarasi *Nostra Aetate*, Gereja menegaskan sikap hormat terhadap agama-agama lain dan mengakui adanya unsur kebenaran serta kesucian di dalamnya (Paul VI, 1965a). Perspektif tersebut diperdalam dalam ensiklik *Fratelli Tutti*, di mana Paus Fransiskus menekankan pentingnya persaudaraan universal dan solidaritas lintas iman sebagai fondasi kehidupan bersama (Francis, 2020). Dengan demikian, penolakan Gereja terhadap radikalisme tidak hanya bersifat moral, tetapi juga berakar secara doktrinal dalam visi teologis tentang manusia dan masyarakat.

Dalam konteks kehidupan berbangsa, ajaran Katolik tidak mendorong pembentukan negara agama maupun sikap eksklusif yang memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya, umat dipanggil untuk mengintegrasikan iman dengan tanggung jawab kewargaan secara seimbang dan kritis. Loyalitas kepada Gereja tidak dipertentangkan dengan kesetiaan kepada negara, sejauh nilai-nilai kebangsaan menghormati kebebasan beragama dan martabat manusia. Ajaran ini bertumpu pada Kitab Suci serta Magisterium Gereja, termasuk konstitusi pastoral *Gaudium et Spes* yang menegaskan bahwa Gereja hadir di tengah dunia sebagai mitra dialog dalam membangun tatanan sosial yang adil dan damai (Paul VI, 1965b). Dalam kerangka tersebut, radikalisme dipandang sebagai distorsi religius yang mereduksi agama menjadi instrumen ideologis atau sarana legitimasi kekuasaan, bukan sebagai jalan keselamatan dan rekonsiliasi.

Secara biblis, penolakan terhadap radikalisme berakar pada hukum kasih sebagai norma tertinggi kehidupan Kristiani (Mat. 22:36–39). Kasih kepada Allah dan sesama bukan sekadar prinsip moral, melainkan identitas eksistensial murid Kristus yang dipanggil menjadi “garam dunia” (Mat. 5:13), yakni menghadirkan daya transformasi yang meneguhkan kehidupan bersama. Pewartaan Yesus tentang Kerajaan Allah selalu diiringi tindakan pembebasan, penyembuhan, dan pemulihan martabat manusia. Karena itu, segala bentuk kekerasan atas nama agama bertentangan dengan inti Injil, sebab

merusak relasi persaudaraan yang hendak dibangun Allah dalam sejarah keselamatan. Sejalan dengan visi tersebut, Gereja mendorong umat untuk terlibat secara aktif dalam menentang ketidakadilan dan kekerasan melalui cara-cara yang jujur, arif, dan berlandaskan kasih, demi terwujudnya peradaban kasih sebagai horizon bersama umat manusia (Francis, 2020).

Inkulturasinya Gereja dalam Teologi Kontekstual Masa Kini

Dalam masyarakat Pontianak yang plural dan multikultural, kehadiran Gereja tidak dapat dibatasi pada ruang liturgis atau pewartaan verbal yang bersifat eskatologis. Biarawan dan biarawati dipanggil untuk menghadirkan iman secara konkret di tengah dinamika sosial, termasuk dalam merespons tantangan radikalisme yang nyata dalam kehidupan bersama. Iman, dengan demikian, tidak berhenti sebagai norma doktrinal, melainkan menjadi daya transformasi yang menyentuh dimensi sosial, kultural, dan relasional kehidupan sehari-hari (Bevans & Schroeder, 2004). Perspektif ini sejalan dengan visi Gereja yang ditegaskan dalam *Gaudium et Spes*, yang memahami Gereja sebagai bagian dari dunia yang turut merasakan sukacita dan kecemasan umat manusia (Paul VI, 1965b). Dalam kerangka tersebut, keterlibatan sosial para religius bukanlah aktivitas tambahan, melainkan ekspresi iman akan Allah yang berkarya dalam sejarah.

Pendekatan teologi kontekstual membantu menjelaskan dinamika tersebut. Teologi ini bertolak dari perjumpaan antara Injil dan realitas konkret, sehingga refleksi iman tidak dilepaskan dari pengalaman hidup umat. Dalam konteks Kalimantan Barat yang dihuni oleh beragam etnis: Melayu, Dayak, Tionghoa, dan komunitas lainnya, Gereja tidak meniadakan nilai-nilai budaya lokal, melainkan menghargainya sebagai ruang potensial kehadiran rahmat, sejauh selaras dengan Injil. Proses ini dikenal sebagai inkulturasi, yakni pewartaan yang mengungkapkan kebenaran Injil melalui bahasa, simbol, dan pengalaman konkret masyarakat tanpa kehilangan substansi imannya. Model “terjemahan” dalam teologi kontekstual menegaskan bahwa Injil bersifat melampaui budaya, namun selalu diwujudkan dalam bentuk yang dapat dipahami dalam konteks tertentu. Apabila muncul ketegangan antara budaya dan Injil, Injil tetap menjadi norma kritis yang memurnikan sekaligus mentransformasi budaya tersebut (Bevans, 2002).

Inkulturasinya tidak berhenti pada tataran simbolik atau adaptasi liturgis, tetapi menjangkau praksis sosial yang nyata (Martasudjita, 2021). Pewartaan diterjemahkan dalam upaya membangun dialog lintas agama dan budaya, memperjuangkan keadilan sosial, serta mempromosikan toleransi dan perdamaian sebagai nilai bersama. Dalam terang ensiklik *Fratelli Tutti*, Paus Fransiskus menegaskan bahwa persaudaraan

universal hanya mungkin terwujud melalui perjumpaan dan keterlibatan konkret di tengah masyarakat (Francis, 2020). Tanggung jawab ini tidak hanya melekat pada imam atau religius, tetapi pada seluruh umat Allah yang dipanggil menghadirkan Kristus melalui tindakan, pilihan hidup, dan kesaksian yang membangun kesejahteraan bersama (Tjang et al., 2025). Dengan demikian, Gereja yang berinkulturasi adalah Gereja yang setia pada Injil sekaligus terbuka terhadap dinamika zaman: Injil menerangi konteks, dan konteks menjadi ruang konkret di mana kabar baik tentang damai, keadilan, dan persaudaraan diwujudkan secara membumi.

Implementasi Ajaran Katolik dalam Praktik Semangat Kebangsaan Kaum Religius

Penghayatan semangat kebangsaan dalam kehidupan biarawan-biarawati berakar pada kesadaran historis dan teologis mengenai panggilan Gereja di tengah realitas bangsa Indonesia. Semangat kebangsaan tidak direduksi menjadi retorika politik atau simbol nasionalisme formal, melainkan dipahami sebagai habitus etis yang lahir dari integrasi antara iman dan tanggung jawab kewargaan. Dalam konteks Indonesia yang dibangun di atas fondasi Pancasila dan keberagaman, komitmen kebangsaan dimaknai sebagai partisipasi aktif dalam merawat persatuan, menumbuhkan cinta tanah air, serta memelihara penghargaan terhadap perbedaan (Widharsana, 2018). Arah ini sejalan dengan refleksi sosial Gereja yang menempatkan persaudaraan dan solidaritas sebagai dasar kehidupan bersama (Francis, 2020). Di Pontianak, pluralitas etnis dan agama membentuk ruang konkret bagi internalisasi nilai tersebut. Berdasarkan temuan lapangan, relasi antarumat beragama relatif terjaga melalui praktik toleransi yang telah menjadi kesadaran kolektif. Dalam kerangka ini, iman Katolik tidak diposisikan berhadapan dengan loyalitas kebangsaan, melainkan memperdalam komitmen terhadap kehidupan bersama yang adil, damai, dan inklusif.

Secara eklesiologis, Gereja memahami dirinya sebagai bagian integral dari bangsa, bukan entitas yang berdiri di luar atau di atas negara. Spirit “100% Katolik, 100% Indonesia” yang diwariskan oleh Albertus Soegijapranata merefleksikan sintesis iman dan nasionalisme yang saling meneguhkan. Ketaatan kepada otoritas Gereja tidak meniadakan penghormatan terhadap hukum negara, melainkan ditempatkan dalam relasi komplementer demi mewujudkan kesejahteraan bersama (*bonum commune*) (Surbakti & Stanislaus, 2023). Perspektif ini selaras dengan ajaran Gereja tentang keterlibatan umat beriman dalam tata sosial-politik sebagai wujud tanggung jawab iman seperti dinyatakan dalam dokumen *Gaudete et Exsultate* (Francis, 2018). Dalam

praksisnya, partisipasi tersebut banyak diwujudkan melalui peran kaum awam di ruang publik, sementara biarawan-biarawati menghidupi dimensi profetis melalui karya pendidikan, pelayanan kesehatan, pendampingan sosial, dan penguatan komunitas yang terbuka bagi semua tanpa diskriminasi. Dengan demikian, nilai Kerajaan Allah tidak berhenti pada spiritualitas privat, tetapi menjelma dalam transformasi sosial yang konkret.

Implementasi semangat kebangsaan dalam kehidupan kaum religius Katolik tampak dalam sikap pelayanan, persaudaraan, moderasi, dan keberpihakan pada martabat manusia. Kaum biarawan, terutama para imam, mengaktualisasikannya melalui kepemimpinan pastoral, pewartaan Sabda, perayaan liturgi, bimbingan rohani, serta pendampingan konseling yang menegaskan hukum kasih sebagai fondasi relasi sosial. Sementara itu, kaum biarawati menghadirkan nilai yang sama melalui pendidikan, pemberdayaan masyarakat, karya sosial, dan pendampingan komunitas dengan penekanan pada penghargaan setiap pribadi sebagai citra Allah. Keragaman ekspresi ini menunjukkan dinamika karisma yang saling melengkapi dalam membangun kesadaran kebangsaan (O'Malley, 2019). Secara teologis, praksis tersebut dapat dipahami dalam lima dimensi kehidupan Gereja: *diakonia*, *kerygma*, *koinonia*, *leitourgia*, dan *martyria*, yang menegaskan bahwa kesaksian iman selalu memiliki implikasi sosial seperti tertuang dalam dokumen *Perfectae Caritatis* (Paul VI, 1965c). Dengan demikian, semangat kebangsaan bagi biarawan-biarawati bukanlah agenda tambahan di luar panggilan religius, melainkan ekspresi integral dari spiritualitas yang berakar pada Injil sekaligus terarah pada pembaruan kehidupan bangsa.

Upaya Pemecahan Radikalisme dalam Semangat Moderasi Beragama dalam Terang Iman Katolik

Radikalisme agama merupakan persoalan yang rumit dan tidak dapat diselesaikan dengan satu metode saja. Penanganannya memerlukan pendekatan yang menyentuh aspek teologis, pendidikan, sosial, dan kultural secara menyeluruh. Dalam konteks masyarakat Kota Pontianak yang plural, upaya pencegahan dan penanggulangan radikalisme oleh para biarawan-biarawati dapat dipahami dalam kerangka moderasi beragama sebagaimana dirumuskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2019). Moderasi beragama menekankan keseimbangan, penghargaan terhadap keberagaman, serta komitmen kebangsaan sebagai dasar kehidupan bersama. Dalam perspektif iman Katolik, nilai-nilai tersebut selaras dengan spiritualitas kasih, keadilan, dan

kesejahteraan bersama. Beberapa upaya pemecahan radikalisme yang dapat dilakukan adalah:

1. Penguatan Pendidikan Agama yang Otentik dan Mencerahkan

Langkah utama dalam mencegah radikalisme ialah menghadirkan pendidikan agama yang benar, menyeluruh, dan relevan dengan konteks kehidupan. Pendidikan iman tidak hanya berfokus pada penyampaian ajaran, tetapi juga pada pembentukan pribadi yang matang secara rohani dan sosial. Proses ini berawal dari keluarga sebagai “Gereja domestik”, kemudian diperkuat melalui sekolah, katekese, dan pembinaan di paroki. Pendidikan agama yang sehat membantu umat memahami ajaran imannya secara proporsional sekaligus menumbuhkan sikap hormat terhadap agama lain. Dalam pandangan Gereja, pendidikan seharusnya membebaskan dari pola pikir sempit dan menumbuhkan nurani yang mampu membedakan antara kebenaran iman dan penyalahgunaan agama demi kepentingan tertentu. Dengan demikian, iman tidak berkembang menjadi sikap eksklusif, tetapi menjadi kekuatan yang mentransformasi masyarakat menuju perdamaian (Agustiani et al., 2024).

2. Membangun Dialog sebagai Jalan Perjumpaan

Dialog antarumat beragama merupakan sarana penting untuk mengurangi prasangka dan mencegah kesalahpahaman teologis. Dialog bukan sekadar komunikasi formal, melainkan perjumpaan yang dilandasi semangat saling mendengar dan belajar. Melalui proses ini, setiap pihak tetap teguh pada identitasnya, namun sekaligus memperdalam keyakinan dalam suasana saling menghargai. Dalam ajaran Gereja, dialog menjadi bagian dari perutusan yang menghormati martabat manusia. Kerja sama dengan pemerintah, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan komunitas lintas iman menjadi langkah konkret untuk memperkuat saling pengertian serta menjaga kerukunan di tengah keragaman etnis dan budaya Pontianak (Konferensi Wali Gereja Indonesia, 2014).

3. Penanaman Nilai Toleransi melalui Pendidikan Agama Katolik (PAK)

Pendidikan Agama Katolik (PAK) memiliki peran penting dalam membentuk karakter yang toleran dan cinta damai. Melalui kurikulum, metode pembelajaran, dan pembinaan iman yang dialogis, nilai keadilan, kasih, dan perdamaian ditanamkan secara terarah. PAK tidak hanya menyentuh aspek pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran batin dan komitmen nyata untuk menghormati sesama. Kolaborasi antara Gereja dan pemerintah dalam bidang pendidikan turut memperkuat dimensi kebangsaan dalam pembinaan iman. Dengan demikian, peserta didik diharapkan tumbuh sebagai

pribadi beriman sekaligus warga negara yang bertanggung jawab dan menjunjung persatuan (Wea & Tage, 2023).

4. Penghormatan terhadap Martabat Setiap Manusia

Moderasi beragama dalam iman Katolik berakar pada keyakinan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sikap hormat tidak dibatasi oleh perbedaan usia, status, agama, atau latar belakang sosial, melainkan mencerminkan keterbukaan terhadap semua orang. Penghormatan ini diwujudkan melalui tutur kata yang santun, empati, dan tindakan yang adil. Dalam masyarakat multikultural, penghargaan terhadap martabat manusia menjadi benteng moral terhadap diskriminasi dan kekerasan berbasis ideologi (Pontifical Council for Justice and Peace, 2004).

5. Meneguhkan Persatuan dan Kesatuan

Semangat persaudaraan universal menjadi dasar terbentuknya solidaritas sosial. Persatuan tidak berarti menyeragamkan perbedaan, tetapi mengintegrasikannya dalam visi bersama demi kebaikan bersama. Keterbukaan untuk belajar dari tradisi lain, bekerja sama dalam kegiatan sosial, dan membangun persahabatan lintas iman memperkuat kohesi sosial serta meminimalkan konflik. Dalam kerangka ini, semangat kebangsaan tidak bertentangan dengan iman, melainkan menjadi wujud konkret kasih Kristiani dalam kehidupan bernegara (Francis, 2020).

6. Menghidupi Perdamaian sebagai Tindakan Nyata

Perdamaian bukan sekadar wacana moral, tetapi komitmen hidup yang harus diwujudkan secara konkret. Pencegahan radikalisme dimulai dari sikap pribadi untuk tidak menyebarkan kebencian, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, serta aktif membangun rekonsiliasi saat terjadi konflik. Spiritualitas kasih mendorong umat untuk menghadirkan damai melalui solidaritas sosial, kepedulian terhadap yang lemah, dan keterlibatan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, iman tidak berhenti di ranah privat, tetapi menjadi kekuatan publik yang membawa kesejukan (Pontifical Council for Justice and Peace, 2004).

7. Pengembangan Pola Pikir Kritis dan Terbuka

Di tengah derasnya arus informasi digital, kemampuan berpikir kritis menjadi kebutuhan mendesak. Berbagai paham radikal kerap menyebar melalui media sosial dengan narasi provokatif. Karena itu, umat perlu dibekali kemampuan menyaring informasi, memverifikasi kebenaran, dan menilai ajaran dalam terang iman serta akal budi. Sikap kritis bukan berarti meragukan agama, melainkan memperdalam iman

melalui refleksi rasional. Pendekatan ini membantu mencegah fanatisme sempit dan menumbuhkan toleransi (Wea & Tage, 2023).

8. Keterlibatan dalam Komunitas Keberagaman

Pembentukan komunitas lintas iman dan budaya menjadi sarana efektif untuk memperkuat persatuan sosial. Melalui kegiatan bersama, baik sosial, budaya, maupun edukatif, masyarakat dapat saling mengenal tradisi dan praktik keagamaan satu sama lain. Pengalaman langsung tersebut mengurangi stereotip dan membangun kepercayaan. Penanaman nilai keberagaman sejak dini penting agar generasi muda tumbuh dengan pola pikir inklusif. Kegiatan seperti kunjungan lintas tempat ibadah atau dialog budaya dapat memperluas wawasan tentang kemajemukan bangsa (Banks, 2016).

9. Menghapus Intoleransi dan Prasangka

Langkah penting lainnya ialah membersihkan sikap batin dari prasangka dan kecurigaan. Intoleransi sering muncul akibat ketidaktahuan dan rasa takut terhadap perbedaan. Oleh sebab itu, pendekatan yang mengedepankan perjumpaan, pendidikan, dan kerja sama sosial menjadi kunci membangun rasa saling percaya. Moderasi beragama dalam terang iman Katolik menuntut kesiapan untuk hidup berdampingan secara damai tanpa kehilangan identitas iman. Semangat nasionalisme dan cinta tanah air menjadi ruang konkret untuk mewujudkan nilai Injili dalam kehidupan bermasyarakat (Venansius & Kristianus, 2025).

Dengan demikian, peran biarawan-biarawati tidak hanya terbatas pada pelayanan sakramental, tetapi juga meluas sebagai penggerak perubahan sosial. Melalui pendidikan, dialog, pembinaan karakter, dan keterlibatan aktif dalam masyarakat, mereka menghadirkan nilai Injili dalam praksis kebangsaan. Iman yang dihayati secara autentik bukan hanya membangun Gereja, tetapi juga memperkokoh dasar perdamaian dan persatuan di Kota Pontianak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa radikalisme agama merupakan fenomena multidimensional yang muncul akibat interaksi kompleks antara faktor teologis, sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan. Dalam konteks Kota Pontianak yang plural dan multikultural, kaum religius Katolik memainkan peran strategis dalam menanggulangi radikalisme melalui internalisasi semangat kebangsaan yang berakar pada kesadaran historis dan teologis. Praktik mereka mencakup pendidikan, pelayanan sosial, pendampingan komunitas, serta pewartaan nilai kasih dan keadilan yang menegaskan

martabat setiap manusia. Implementasi semangat kebangsaan ini tidak hanya menjadi ekspresi loyalitas kepada negara, tetapi juga merupakan perwujudan konkret panggilan Injili yang mengintegrasikan iman dengan tanggung jawab kewargaan. Dengan demikian, Gereja yang berinkulturasi hadir sebagai agen transformasi sosial yang memperkuat dialog lintas agama, persaudaraan, dan kohesi sosial dalam masyarakat plural.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan radikalisme menuntut pendekatan komprehensif yang memadukan dimensi teologis, pendidikan, sosial, dan kultural. Strategi yang efektif meliputi penguatan pendidikan agama Katolik yang mencerahkan, dialog lintas iman, penghormatan terhadap martabat manusia, pengembangan pola pikir kritis, serta keterlibatan aktif dalam komunitas keberagaman. Pendekatan ini membangun kesadaran kolektif yang moderat, toleran, dan inklusif, sehingga iman tidak berhenti sebagai pengalaman privat, tetapi menjadi kekuatan publik yang mempromosikan perdamaian, persatuan, dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, peran kaum religius Katolik tidak hanya sekadar pembinaan rohani, melainkan juga berkontribusi terhadap pengokohan fondasi kebangsaan dan pengembangan masyarakat yang adil, damai, dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiani, R., Safitri, D., & Sujarwo. (2024). Peran Gereja Katolik di Jakarta dalam masyarakat pluralis: Kontribusi, tantangan, dan prospek. *JICN: Jurnal Intelek dan Cedikiawan Nusantara*, 1(2), 731–738.
- Anggoro, S., & Albina, M. (2025). Nilai-nilai pilar Pancasila sebagai komitmen kebangsaan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu*, 2(6), 230–235. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14749086>
- Banks, J. A. (2016). *Cultural diversity and education: Foundations, curriculum, and teaching*. Routledge.
- Bevans, S. B. (2002). *Models of contextual theology*. Orbis Books.
- Bevans, S. B., & Schroeder, R. P. (2004). *Constants in context: A theology of mission for today*. Orbis Books.
- Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan. (2019). *Moderasi beragama*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.)*. SAGE Publications.

- Cornille, C. (Ed.). (2013). *The Wiley-Blackwell companion to inter-religious dialogue*. Wiley-Blackwell.
- Franc, R., & Pavlović, T. (2023). Inequality and radicalisation: Systematic review of quantitative studies. *Terrorism and Political Violence*, 35(4), 785–810. <https://doi.org/10.1080/09546553.2021.1974845>
- Francis, P. (2018). *Gaudete et exultate: Apostolic exhortation on the call to holiness in today's world*. Libreria Editrice Vaticana.
- Francis, P. (2020). *Fratelli tutti: Encyclical letter on fraternity and social friendship*. Libreria Editrice Vaticana.
- Gurusinga, R. E., Gurusinga, R. D., & Barus, A. (2025). Menghidupi cinta tanpa syarat: Konsep “caritas” dalam ajaran Katolik dan dampaknya bagi masyarakat plural. *Jurnal Pastoral Kateketik*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.70343/4znffr54>
- Jarvis, L., Lehane, O., Macdonald, S., & Nouri, L. (2017). *Terrorists' use of the internet: Assessment and response*. SAGE Publications.
- Kubacki, Z. J. (2021). Religious pluralism from the Catholic point of view. *Verbum Vitae*, 39(2), 527–542. <https://doi.org/10.31743/vv.12297>
- Konferensi Wali Gereja Indonesia. (2014). *Iman Katolik: Buku informasi dan referensi*. PT Kanisius.
- Martinus., Pongkot, H., & Lisarani, V. (2023). Dialog dan persahabatan sosial pada satu-satunya perguruan tinggi Katolik negeri Pontianak di Indonesia: Memaknai ensiklik Fratelli Tutti Paus Fransiskus. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Keagamaan, 1, 108–116.
- Martasudjita, E. (2021). *Teologi inkulturasi: Perayaan Injil Yesus Kristus di Bumi Indonesia*. PT Kanisius.
- Medda-Windischer, R., Budabin, A. C., & Zeba, M. (2024). Introduction: The intersection of religion with radicalization and de-radicalization processes in comparative perspective. *Religions*, 15(11), 1410. <https://doi.org/10.3390/rel15111410>
- O'Malley, J. W. (2019). *When bishops meet: An essay comparing Trent, Vatican I, and Vatican II*. Belknap Press.
- Paul VI, P. (1965a). *Nostra aetate: Declaration on the relation of the Church to non-Christian religions*. Libreria Editrice Vaticana.
- Paul VI, P. (1965b). *Gaudium et spes: Pastoral constitution on the Church in the modern world*. Libreria Editrice Vaticana.
- Paul VI, P. (1965c). *Perfectae caritatis: Decree on the adaptation and renewal of religious life*. Libreria Editrice Vaticana.

- Pontifical Council for Justice and Peace. (2004). *Compendium of the social doctrine of the Church*. Libreria Editrice Vaticana.
- Surbakti, M. E., & Stanislaus, S. (2023). Seratus persen Katolik, seratus persen Indonesia: Uraian deskriptif kritis atas pandangan Albertus Soegijapranata mengenai jiwa nasionalisme umat Katolik Indonesia sebagai warga negara Indonesia. *Rajawali*, 20(2), 59–66.
- Steffen, L. (2021). *Christianity and violence*. Cambridge University Press.
- Tjang, Y. S., & Soeryamassoka, H. M. (2025). Agama dan fenomena sosial kontemporer: Kajian sosiologi agama atas konflik keagamaan, bunuh diri, dan kecerdasan buatan. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 9(2), 100–111. <https://doi.org/10.61831/gvjkp>
- Tjang, Y. S., Prasetyo, L., Astuti, R. E., Wyatno, A. K., Sinaga, A. M. T., Muliawati, V. A., & Andry, V. R. N. (2025). Konsep kebajikan Thomas Aquinas sebagai landasan paradigmatis bagi manajemen dan kepemimpinan Kristiani. *Jurnal Selidik (Jurnal Seputar Penelitian Pendidikan Keagamaan)*, 6(2), 114–124. <https://doi.org/10.61717/sl.v5i2.140>
- Venansius, K. A. (2025). Moderasi beragama sebagai sarana mempertahankan predikat Singkawang kota tertoleran. *In Veritate Lux: Jurnal Ilmu Kateketik Pastoral Teologi, Pendidikan, Antropologi, dan Budaya*, 8(1), 57–71.
- Wahyuni, R., Rahma, H. L. F., & Putri, H. H. (2022). Pemahaman radikalisme. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 180–188. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2115>
- Wahyuni, S., Musmulyadi, & Maskuri. (2025). Perspektif baru moderasi beragama dalam dinamika kehidupan Kota Pontianak. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1), 404–411. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i1.9025>
- Wea, M. F., & Tage, A. C. D. (2023). Pembentukan karakter siswa melalui pendidikan Agama Katolik di Sekolah Dasar. *Vocat: Jurnal Pendidikan Katolik*, 3(2), 31–35. <https://doi.org/10.52075/vctjpk.v3i2.200>
- Widharsana, P. D. (2018). *Mengamalkan Pancasila dalam terang iman Katolik*. PT Kanisius.